

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Human Capital Theory

Menurut Zuriani Ritonga (2019:25), *human capital* terdiri dari dua kata dasar, yaitu manusia dan kapital (modal). Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan dalam menciptakan barang atau jasa tanpa dikonsumsi selama proses produksi. Dalam konsep *human capital*, manusia dianggap sebagai modal produktif yang berperan dalam aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan transaksi.

Todaro (2015:365-366) menyatakan bahwa konsep *human capital* dapat dipahami sebagai investasi individu untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa depan. Investasi ini mencakup pendidikan dan kesehatan, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula keterampilannya. Namun, pendidikan tinggi tanpa kesehatan yang baik tidak akan meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi kesadaran individu terhadap pentingnya kesehatan.

Teori *human capital* menekankan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Schultz (1961) menegaskan bahwa *human capital* merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara. Investasi dalam modal manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, kesehatan, dan mobilitas tenaga kerja guna memanfaatkan peluang kerja yang lebih baik. Suryono Efendi (2019:13)

menambahkan bahwa *human capital* mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan aset sosial individu. Dalam konteks ini, belanja pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan menjadi dasar peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan adalah elemen fundamental dalam pembangunan. Kesehatan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara pendidikan berperan penting dalam menyerap teknologi modern dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Modal manusia mencakup berbagai aspek seperti keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan lokasi, yang semuanya dihasilkan melalui investasi di bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta perawatan kesehatan (Todaro, 2011:445).

Terdapat hubungan kausalitas dua arah, yaitu pendapatan yang lebih tinggi akan membuat warga negara dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan sehingga kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Dengan adanya hubungan kausalitas tersebut terciptanya kebijakan terpadu, berupa pembangunan yang difokuskan pada pendapatan, kesehatan, dan pendidikan secara bersamaan (Todaro, 2011:449). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan dasar modal manusia berkonsentrasi pada kemampuan tak langsung pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan (Todaro, 2011:452).

2.1.2 Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak (Lady, 2023:51). Menurut UNDP (1995), pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan manusia. Pada semua level pembangunan, terdapat tiga pilihan mendasar yang harus dipenuhi, yaitu untuk hidup sehat dan panjang umur, memperoleh pendidikan, dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar dapat hidup layak.

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dalam laporan Human Development Report (HDR). UNDP menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan sejati suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan manusia bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk hidup produktif, sehat, berpendidikan, dan memiliki standar hidup yang layak. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya menempatkan manusia sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai tujuan akhir pembangunan (Chandra, 2022).

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam memastikan masyarakat memiliki pilihan yang luas. Peran pemerintah dalam pembangunan manusia dapat dilihat melalui kebijakan belanja daerah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan.

Konsep pembangunan manusia muncul sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi. Konsep ini tidak hanya memperhitungkan pendapatan, tetapi juga aspek kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur bagaimana penduduk suatu negara dapat mengakses hasil pembangunan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Mengacu pada UNDP (Human Development Report, 1995:103, Nida 2023), terdapat lima poin penting dalam pembangunan manusia:

1. Pembangunan harus mengutamakan masyarakat sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk seperti umur panjang, sehat, dan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan saja.
3. Pembangunan manusia tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan manusia melainkan upaya-upaya untuk memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar utama yaitu, pemberdayaan, pemerataan, produktivitas, dan kesinambungan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar untuk menentukan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan-pilihan yang tersedia untuk mencapainya.

2.1.2.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Todaro dan Smith (2011:57) Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial-ekonomi suatu negara,

yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Sementara itu, UNDP (1990), menekankan bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk. Dalam konsep ini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995).

Pada *Human Development Report* (1990) diperkenalkan tiga indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yaitu umur pajang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM, dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan produk nasional bruto per kapita.

2.1.2.2 Komponen Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia dibangun melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak. Dimana dimensi umur panjang dan sehat (kesehatan) diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan (pendidikan) diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita.

1. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan suatu indeks yang diukur dengan angka harapan hidup. Angka ini menggambarkan rata-rata perkiraan panjangnya waktu yang dapat di tempuh oleh seseorang selama hidup di suatu daerah. Perhitungan angka harapan hidup dilakukan secara tidak langsung (*indirect estimation*) dengan menggunakan dua data dasar yaitu rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

2. Tingkat Pendidikan

Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dimana rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal dan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai berapa lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan anak umur tertentu di masa yang akan datang. Harapan lama sekola dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun). Harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang ditetapkan sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum adalah 18 tahun dan batas minimum 0 (nol).

3. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya ekonomi. Standar hidup layak

dapat dihitung menggunakan nilai minimum dan maksimum yang setiap tahunnya mengalami penyesuaian. Angka minimum diperoleh dari garis kemiskinan terendah pada tahun yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik dan untuk angka maksimum diperoleh dari perkiraan output perkapita yang paling tinggi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025).

2.1.2.3 Pengukuran Pembangunan Manusia

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pendekatan baru dari UNDP untuk mengukur pembangunan manusia (BPS, 2019:11). UNDP memperkenalkan metode baru untuk menghitung indeks pembangunan manusia dengan cara mengubah beberapa indikator yang dianggap kurang relevan. Hal ini didasari dengan alasan yang cukup rasional karena ada alasan utama pada IPM dimana perhitungannya melibatkan dua elemen penting untuk mencapai hasil yang relevan. Konsep yang digunakan dalam pembangunan manusia yaitu pemerataan pembangunan dan sangat anti dengan ketimpangan pembangunan (Eka, 2020). Oleh karena itu, tujuannya agar hasil yang dicapai dengan nilai IPM yang rendah tidak ditutupi oleh capaian yang tinggi di bidang lain.

Indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi dasar diubah dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, karena sudah tidak relevan untuk mengukur pendidikan secara keseluruhan. Dengan menggunakan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat diperoleh gambaran yang relevan terhadap perubahan dan kemajuan pendidikan yang

terjadi, dilihat dari banyak negara yang capaiannya sudah sangat tinggi dalam hal indikator standar hidup layak PNB riil perkapita (BPS, 2022:12). Untuk menghitung nilai IPM menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} \text{ Indeks } X_1 + \text{ Indeks } X_2 + \text{ Indeks } X_3$$

Keterangan:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

X_1 : Indeks Kesehatan

X_2 : Indeks Pendidikan ($\frac{2}{3}$ indeks melek huruf + $\frac{1}{3}$ indeks rata-rata lama sekolah)

X_3 : Indeks Pengeluaran Perkapita

Terdapat empat kelompok yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan capaian Pembangunan Manusia di suatu daerah pada waktu tertentu, yaitu:

Tabel 2. 1 Kriteria Capaian Pembangunan Manusia

Presentase IPM	Kriteria
≥ 80	Sangat Tinggi
$70 \leq IPM < 80$	Tinggi
$60 \leq IPM < 70$	Sedang
< 60	Rendah

Sumber: Katalog IPM Provinsi Jawa Timur 2022 BPS (2022:10)

2.1.3 Belanja Urusan Kesehatan

2.1.3.1 Pengertian Belanja Urusan Kesehatan

Belanja kesehatan adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai berbagai program kesehatan masyarakat termasuk penyediaan layanan kesehatan dasar, pembiayaan rumah sakit, penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan pendukung kebijakan kesehatan lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2020:5).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, belanja kesehatan adalah alokasi anggaran pemerintah pusat atau daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan nasional secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta memperkuat sistem kesehatan nasional (UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 454).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kebijakan pengalokasian anggaran kesehatan yang sebelumnya berbasis persentase dari APBN dan APBD kini bergeser ke pendekatan berbasis rencana induk bidang kesehatan. Perubahan ini mengadopsi prinsip *money follow program*, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penganggaran serta pencapaian target kesehatan nasional (Kementerian Keuangan, 2024:21). Dengan demikian, pemerintah, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap sektor kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Belanja Urusan Kesehatan

Belanja urusan kesehatan mencakup berbagai jenis pengeluaran, seperti pengadaan obat-obatan, peralatan medis, pembangunan rumah sakit, posyandu dan pusat kesehatan masyarakat. Semua investasi ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Kamila dan Widiastuti, 2016). Struktur anggaran kesehatan dalam APBN terbagi menjadi tiga bagian, yaitu

1. Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat merupakan alokasi anggaran kesehatan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan belanja melalui non kementerian/lembaga yang mencakup jaminan pelayanan kesehatan oleh pemerintah, cadangan program jaminan kesehatan nasional, cadangan anggaran kesehatan, dan cadangan bantuan iuran jaminan kesehatan.
2. Anggaran kesehatan melalui transfer ke daerah merupakan lokasi anggaran yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang mencakup dana alokasi khusus kesehatan dan keluarga berencana, dan bantuan operasional kesehatan.
3. Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran yang bersumber dari komponen pembiayaan APBN, misalnya penyertaan modal negara kepada BPJS kesehatan untuk program dana jaminan sosial kesehatan.

Belanja urusan kesehatan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Belanja fisik urusan kesehatan

Belanja fisik urusan kesehatan meliputi pengeluaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, revitalisasi puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), posyandu, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat layanan kesehatan preventif dan kuratif guna meningkatkan

taraf kesehatan masyarakat. araf kesehatan masyarakat serta memperpanjang usia harapan hidup.

2. Belanja non fisik urusan Kesehatan

Belanja non-fisik urusan kesehatan meliputi pendanaan untuk operasional dan program kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan (2023:13), belanja ini mencakup:

a. Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Bantuan Iuran Kesehatan Masyarakat

Anggaran kesehatan yang digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan layanan Jaminan Kesehatan Negara (JKN) seperti bantuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS), dan mendorong pola hidup sehat akan memungkinkan setiap orang memiliki kehidupan yang layak dan umur panjang sesuai dengan dimensi pertama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut terjadi ketika akses terhadap kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Negara (JKN) telah terpenuhi oleh subsidi pemerintah.

b. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Program Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dapat membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat. Belanja Kesehatan ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program penyehatan lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.

c. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Dana BOKB diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

2.1.3.3 Kriteria Belanja Urusan Kesehatan

Menurut Sevelia (2020), belanja urusan kesehatan dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan dan jasa sanitasi lingkungan
2. Pembangunan rumah sakit dan insitusi kesejahteraan sosial
3. Pendidikan, pelatihan dan penelitian medis murni
4. Pekerjaan medis sosial dan kerja sosial kesehatan
5. Praktik medis dan penyediaan pelayanan kesehatan tradisional.

Belanja kesehatan diarahkan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Investasi dalam sektor ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Hernianingrum, 2015).

2.1.4 Belanja Urusan Pendidikan

2.1.4.1 Pengertian Urusan Pendidikan

Menurut Khusaini (2023:19) belanja pendidikan merupakan bagian dari pengeluaran publik yang digunakan untuk menyediakan sumber daya pendidikan guna mendukung penyelengaran pendidikan dan menghasilkan sumber daya

manusia yang berkualitas. Belanja pendidikan adalah peneluaran untuk mendukung sektor pendidikan, termasuk pembangunan sekolah, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan penyediaan bahan ajar (Salomi, 2019:161).

Menurut Kementerian Keuangan RI (2018:9) mendefinisikan belanja pendidikan sebagai alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, seperti penyediaan fasilitas pendidikan, penggajian tenaga pendidik, program pendidikan, dan kegiatan lain yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sesuai dengan jenjangnya. Belanja pendidikan adalah bentuk investasi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia yang berdampak langsung terhadap peningkatan dimensi pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini termasuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia (Todaro, 2006).

2.1.4.2 Kebijakan Belanja Urusan Pendidikan

Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dijalankan berdasarkan pada amanah undang-undang dan ketentuan hukum lainnya. Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20 % dari APBN maupun APBD untuk memenuhi keperluan penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

Implementasi dari ketentuan tersebut diatur lebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022. Dalam pasal 80 peraturan tersebut, diatur bahwa pengalokasian APBN setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja negara dan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Sedangkan dalam Pasal 81 diatur bahwa pengalokasian APBD setiap tahunnya juga ditentukan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah. Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan belanja pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi serta sosial secara berkelanjutan (Susanti, 2020). Belanja Pendidikan yang lebih tinggi berdampak langsung terhadap pencapaian dimensi pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Belanja Urusan Pendidikan

Belanja pendidikan digunakan untuk membiayai sumber daya atau input pendidikan, seperti gaji guru, tunjangan profesi guru, pembangunan sekolah baru, pengadaan kelas baru, rehabilitasi gedung dan ruang kelas, beasiswa pendidikan bagi siswa yang berprestasi, dan bantuan operasional sekolah (Kemendikbud RI, 2020). Struktur anggaran pendidikan dalam APBN terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga.
2. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan lokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke daerah terdiri dari berbagai nomenklatur mencakup dana alokasi khusus bidang pendidikan, belanja pendidikan yang dialokasikan dalam dana alokasi umum non gaji dan gaji pendidikan, belanja pendidikan yang dialokasikan dalam dana bagi hasil, tunjangan profesi guru, dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) pendidikan, dan bantuan operasional sekolah
3. Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari komponen pembiayaan APBN berupa dana pengembangan pendidikan yang terdiri dari dana abadi pendidikan dan dana cadangan pendidikan.

Belanja urusan pendidikan terdiri dari dua kategori utama, yaitu

1. Belanja Fisik Urusan Pendidikan

Belanja ini mencakup pembangunan sekolah, rehabilitasi gedung sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan yang layak.

2. Belanja Non Fisik Urusan Pendidikan

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023:10), belanja non-fisik pendidikan mencakup:

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dialokasikan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BOS terdiri atas bantuan operasional sekolah reguler diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di seluruh provinsi, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dasmen), dan bantuan operasional sekolah kinerja digunakan untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah dan menciptakan community learning di daerah serta digunakan untuk peningkatan prestasi disekolah.
- b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu.
- c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak

dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal.

- d. Peningkatan pendidikan vokasi, yang mencakup pelatihan industri dan penelitian untuk menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di sektor industri kreatif dan teknologi.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sektor pendidikan mendapatkan pembiayaan yang memadai guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia mengukur dampak belanja pendidikan melalui indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Peningkatan belanja di sektor ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro, 2006).

2.1.5 Kajian Empiris

Pada penelitian ini penulis menyimpulkan referensi dari beberapa jurnal penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mempermudah proses penelitian antara lain. Menurut Kamila & Widiastuti (2016) meneliti tentang Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Periode 2011-2013 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial belanja pendidikan berpengaruh positif, dan belanja kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di papua. Secara simultan belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di papua.

Menurut Muliza et al., (2017) meneliti tentang Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan, tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Menurut Muskanan & Tomasowa (2019) meneliti tentang Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial belanja daerah bidang pendidikan, kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan belanja daerah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2010-2017.

Menurut Fajar & Indrawati (2020) meneliti tentang Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial belanja pendidikan berpengaruh signifikan, sedangkan belanja kesehatan, belanja perumahan, dan fasilitas umum tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan belanja pendidikan, belanja kesehatan,

dan belanja perumahan dan fasilitas umum berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupataen Cianjur.

Menurut Setiawan & Fikriah (2020) meneliti tentang Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan, dan belanja pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Menurut Harjunadhi & Rahmawati (2020) meneliti tentang Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan UMP terhadap IPM di Indonesia tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan, belanja kesehatan berpengaruh tidak signifikan, dan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

Menurut Prastiwi & Handayani (2021) meneliti tentang Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh secara positif dan tidak signifikan, sedangkan belanja pemerintah bidang

kesehatan berpengaruh secara negatif dan signifikan, dan PDRB berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di wilayah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Fahrianti & Saleh (2021) meneliti tentang Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2003-2015. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan belanja daerah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 20%, belanja daerah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sebesar 34%, dan belanja daerah bidang infrastruktur pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sebesar 27,2% di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menurut Irawan (2021) meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020. Hasil Penelitian menyatakan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan. Secara simultan pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan.

Menurut Chandra (2022) meneliti tentang Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja daerah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, dan belanja daerah sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Secara simultan belanja daerah sektor kesehatan dan belanja daerah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010-2019.

Menurut Maryozi et al., (2022) meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengeluaran bidang pendidikan, pengeluaran bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, dan Infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Secara simultan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Menurut Salsabila & Nurjihadi (2022) meneliti tentang Analisa Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2011-2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus bidang pendidikan, alokasi khusus

bidang kesehatan, belanja daerah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan, dan belanja daerah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Secara simultan dana alokasi khusus bidang pendidikan, dana alokasi khusus bidang kesehatan, belanja daerah bidang pendidikan, dan belanja daerah bidang kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2020.

Menurut Aulia et al., (2023) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan manusia (IPM) di kota Mataram Tahun 2012-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji parsial pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dan pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Mataram pada tahun 2012-2021.

Menurut Ramadhani & Utomo (2023) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur tahun 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Indeks Pembangunan Gender, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Jumlah Orang yang

Bekerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

Menurut Ratuludji et al., (2023) meneliti tentang Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi pada 22 Kabupaten/Kota di NTT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja pendidikan, belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, dan belanja infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut Muslihatinningsih et al., (2023) meneliti tentang Apakah Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, pengeluaran pemerintah infrastruktur mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

Menurut Rahajeng & Khusaini (2024) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan namun secara tidak langsung melalui variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah pada fungsi kesehatan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung, dan investasi tidak menunjukkan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui variabel pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Hakim et al., (2024) meneliti tentang Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur: Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Pada Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi serta Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan, belanja pemerintah fungsi pendidikan memberikan pengaruh negatif dan signifikan, dan tingkat kemiskinan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur pada tahun 2017-2021.

Menurut Sumiyarti & Pratama (2024) meneliti Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Secara simultan belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2. 2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Kamila dan Widiastuti (2016) Pengaruh Belanja Daerah Terhadap IPM di Provinsi Papua Periode 2011-2013 dalam Perspektif Ekonomi Islam	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunkan data panel	Periode 2011-2013 Provinsi Papua	Secara parsial belanja pendidikan berpengaruh positif, dan belanja kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di papua. Secara simultan belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.	Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016: 359-374
2	Muliza dan Seftira (2017) Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunkan data panel	Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh	Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. 3 No. 1 Maret 2017 ISSN. 250-6976
3	Muskanan dan Tomasowa (2019) Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010-2017.	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Menggunakan data time seris Kabupaten Timor Tengah	Secara parsial belanja daerah bidang pendidikan, belanja daerah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan belanja daerah bidang pendidikan dan belanja daerah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Vol. 4 No. 1, Halaman:19-24 Juni 2019. ISSN 258-0651.
4	Fajar dan Indrawati (2020)	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan	Variabel Independen: Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum	Secara parsial Belanja Pendidikan berpengaruh signifikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Perumahan dan Fasilitas	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> Vol. 1, No.1,

	Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur)	Belanja Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Menggunkan data time series Kabupaten Cianjur	Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	October 2020, pp. 108-118. ISSN: 2747-1241.
5	Setiawan dan Fikriah (2020) Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunkan data panel	Variabel Independen: Belanja Perlindungan Sosial Indonesia	Belanja pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan, dan belanja pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol. 5 No. 4 November 2020:212-221 ISSN.2549-8363
6	Harjunadhi dan Rahmawati (2020) Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan UMP terhadap IPM di Indonesia tahun 2014-2018.	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunkan data panel	Variabel Independen: Upah Minimum Provinsi	Secara parsial belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan, belanja kesehatan berpengaruh tidak signifikan, dan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Inovasi Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 16 No. 2 2020: 241-249 pISSN 0216-7786. eISSN: 2528-1097.
7	Prastiwi dan Handayani (2021) Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan PDRB	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Kesehatan Variabel Dependen: Indeks	Variabel Independen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah	Belanja Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan, Belanja Kesehatan berpengaruh secara negatif dan signifikan, dan PDRB berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	<i>Diponegoro Journal Of Economis</i> Vol.10 No. 3 Tahun 2021, Halaman: 135-147 ISSN: 2337-3814

	Terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).	Pembangunan Manusia Menggunakan data panel			
8	Fahrianti dan Saleh (2021) Analisis Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2003-2015	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Belanja Infrastruktur Menggunakan data time series	Belanja Pendidikan berpengaruh positif signifikan, Belanja Kesehatan berpengaruh signifikan, dan Belanja Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	JIEP: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 4 No. 2, 2021, hal 323-330. ISSN 2746-3249.
9	Irawan (2021) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020.	Variabel Independen: Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan Pengeluaran Bidang Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan data panel		Secara parsial Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap. Secara simultan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	KLASSEN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2021: 124-134 e-ISSN 2775-7722, p-ISSN 2776-4311.
10	Chandra (2022) Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap	Variabel Independen: Belanja Daerah Sektor Pendidikan dan Belanja Daerah Sektor Kesehatan Variabel Dependen: Indeks		Secara parsial Belanja Sektor Kesehatan dan Belanja Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan Belanja Sektor Kesehatan dan Belanja Sektor Pendidikan berpengaruh	JIEP: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 5 No. 1, 2022, hal 323-337. ISSN 2746-3249.

	Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan	Pembangunan Manusia Menggunakan data panel		positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	
11	Maryozi (2022) Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau.	Variabel Independen: Pengeluaran Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Bidang Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Pengeluaran Infrastruktur Jalan Menggunakan data time series	Secara parsial pengeluaran pendidikan, kesehatan, dan Infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.	Jurnal Niara Vol. 15, No. 1 Mei 2022, Hal 1-11. P-ISSN 1693-3516, E-ISSN 2528-7575.
12	Riantoro et al., (2022) Analisis Pengaruh Belanja Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Papua Barat.	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan data panel		Belanja sektor pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia	Jurnal <i>Techno-Socio Ekonomika</i> , Vol. 15 No. 1, April 2022:1-11, ISSN 1979-4835, E-ISSN 2721-2335.
13	Salsabila dan Nurjihadi (2022) Analisi Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten	Variabel Independen: Belanja Daerah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus Menggunakan data time series	Secara parsial dana alokasi khusus bidang pendidikan, dana alokasi khusus bidang kesehatan, belanja daerah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan, dan belanja daerah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara simultan dana alokasi khusus bidang pendidikan, dana alokasi khusus bidang kesehatan, belanja daerah bidang pendidikan, dan belanja daerah bidang kesehatan berpengaruh terhadap IPM.	JEBI: Jurnanal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 07, No. 01 pp.12-18, ISSN: 2621-9255.

Sumbawa 2011-2020).					
14	Aulia et al., (2023) Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan manusia (IPM) di kota Mataram Tahun 2012-2021.	Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Pendapatan Per Kapita Menggunakan data time series	Secara parsial Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara Simultan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 2 September 2023, ISSN: 2829-2847.
15	Ramadhani dan Utomo (2023) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi i Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur tahun 2010-2020.	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan data panel	Variabel Independen: Indeks Pembangunan Gender, Upah minimum Kbaupaten/kota , Jumlah orang yang bekerja, dan Pertumbuhan Ekonomi.	Indeks Pembangunan Gender, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sedangkan Jumlah Orang yang Bekerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No. 2 February 2023. ISSN:2477-1783 (Print) ISSN:2477-17xx(Online).
16	Ratuludji et al., (2023) Pengaruh Belaja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi pada 22 Kabupaten/Kota di NTT).	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan data panel	Variabel Independen: Belanja Infrastruktur	Secara parsial belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, dan belanja infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara simultan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Edunomika Vol. 08 No. 01, 2023
17	Muslihatinningsih et al., (2023)	Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah	Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, Pengeluaran	JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Akreditas

	Apakah Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.	sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan data panel	Sektor Infrastruktur Menggunakan Sample data 11 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	pemerintah Ifrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dan Pengeluaran Pemerintah Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.	Nomor 21/E/KTP/2018. E-ISSN 2541-0180, P-ISSN 2721-9313.
18	Rahajeng dan Khusaini (2024) Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Kesehatan Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan data panel	Variabel Independen: Investasi Variabel Intervening PDRB Per Kapita ADHB	Belanja Pemerintah pada Fungsi Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan namun secara tidak langsung melalui variabel pertumbuhan, Belanja Pemerintah Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung, dan variabel Investasi tidak memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	JAE: Jurnal Aluntansi dan Ekonomi Akreditasi Nomor 21/E/KPT/2018, Vol. 9 No. 1 Tahun 2024. E-ISSN 2541-0180 P-ISSN 2721-9313.
19	Hakim et al., (2023) Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur: Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Pada Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi serta Tingkat Kemiskinan.	Variabel Independen: Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan dan Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Kesehatan Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan data panel	Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan	Belanja Pemerintah Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan, Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, dan Tingkat Kemiskinan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur pada tahun 2017-2021.	JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha Vol:15 No:02 Tahun 2024
20	Sumiyarti dan Pratama (2024) Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Independen: Belanja Pendidikan dan Kesehatan Variabel Independen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi	Secara parsial belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan laju pertumbuhan ekonomi	Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023: 181-194. ISSN 2442-9686.

Terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat.	Menggunakan data panel	berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat.
Liseu Indriyani, 2025: Penelitian Penulis Pengaruh Belanja Urusan Kesehatan dan Belanja Urusan Pendidikan Terhadap Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023)		

2.2 Kerangka Pemikiran

Belanja daerah pada urusan pendidikan dan kesehatan merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan menjadi kewajiban utama pemerintah daerah. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan, sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan sekitar 10% dari APBD untuk sektor kesehatan.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, belanja pendidikan dan kesehatan termasuk belanja operasional yang ditujukan untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat. Menurut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa belanja publik bertujuan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja publik harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan *value for money* (PP No. 71 Tahun 2010).

Teori Akuntabilitas Publik (*Public Accountability Theory*), menjelaskan bahwa pemerintah sebagai entitas publik bertanggung jawab kepada masyarakat

atas penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah wajib mengelola dan menggunakan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja daerah, khususnya untuk urusan kesehatan dan pendidikan, merupakan bentuk dari pertanggungjawaban tersebut. Belanja publik yang dilakukan dengan prinsip akuntabilitas bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (Mongan, 2019).

Menurut Mardiasmo (2009), belanja publik harus mampu menunjukkan *outcome* nyata, salah satunya adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, Mahmudi (2016) menekankan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak hanya diukur dari efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga dari hasil (*outcome*) yang dicapai, seperti peningkatan IPM.

Dalam konteks Teori Akuntabilitas Publik, belanja urusan kesehatan merupakan bentuk nyata dari kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat, sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik. Alokasi anggaran pada sektor kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, memperbaiki fasilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan medis guna meningkatkan angka harapan hidup yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Belanja urusan kesehatan digunakan untuk membiayai penyediaan layanan kesehatan dasar, peningkatan fasilitas medis dan program kesehatan masyarakat. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap angka harapan hidup yang merupakan indikator dari dimensi kesehatan dalam Indeks pembangunan manusia (Bdan Pusat Statistik, 2023). Sehingga semakin besar dan efektif belanja urusan kesehatan maka semakin tinggi angka harapan hidup masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap meningkatnya pembangunan manusia (Sihaloho, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian (Syamsuddin & Asmara, 2021) menyatakan bahwa belanja urusan kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan angka harapan hidup, yang merupakan salah satu komponen IPM.

Dalam kaitannya dengan peningkatan belanja kesehatan berkorelasi positif dengan peningkatan angka harapan hidup, sebagaimana disampaikan oleh (Sihombing, 2020), peningkatan belanja kesehatan berkorelasi positif dengan peningkatan angka harapan hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar alokasi belanja kesehatan, maka semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan dimensi kesehatan dalam IPM. Hasil ini memperkuat temuan dari (Rajkumar & Swaroop, 2008) menemukan bahwa efektivitas belanja publik di sektor kesehatan berdampak nyata pada penurunan angka kematian anak, yang mencerminkan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, belanja urusan kesehatan yang dikelola secara akuntabel dapat menjadi sarana strategis dalam mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan.

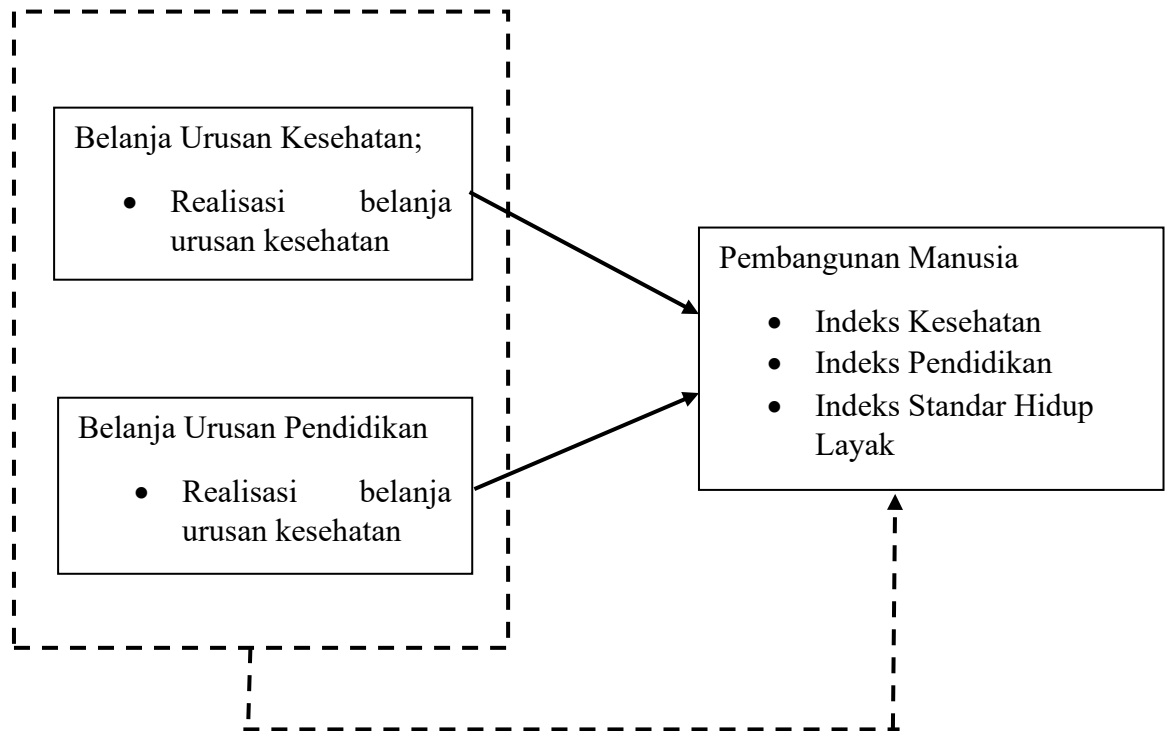
Sementara itu, dalam perspektif Akuntabilitas Publik, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan mampu bersaing secara global. Pemerintah dituntut untuk mengelola anggaran pendidikan secara transparan dan bertanggung jawab agar menghasilkan *outcome* berupa peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Mahar (2018), pendidikan formal yang berkualitas merupakan kebutuhan mutlak yang harus disediakan negara sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia unggul. (UNDP, 2020) menegaskan bahwa pendidikan yang layak merupakan prasyarat utama dalam pembangunan manusia berkelanjutan. Belanja urusan pendidikan yang efektif dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatnya jumlah murid yang menyelesaikan pendidikan hingga ditingkat yang lebih tinggi maka meningkat pula pembangunan manusia disuatu daerah (Prasetio, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) pendidikan merupakan salah satu dimensi utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Belanja urusan pendidikan merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Belanja urusan pendidikan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan mutu pengajaran dan perluasan akses pendidikan. Hal ini akan berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang merupakan indikator pembangunan manusia. Dengan demikian, peningkatan belanja urusan pendidikan yang efektif akan mendorong

peningkatan pembangunan manusia. Sejalan dengan penelitian (Lestari & Mahardika, 2022) menunjukkan bahwa belanja urusan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang pada akhirnya data meningkatkan pembangunan manusia.

Dalam kaitannya dengan penelitian (Maryozy, 2020) menunjukkan bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap indikator pendidikan dalam IPM, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan, termasuk penguasaan teknologi yang dapat meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian, belanja urusan pendidikan yang dikelola secara akuntabel menjadi sarana penting untuk mempercepat pembangunan manusia.

Kerangka pemikiran ini menggambarkan bagaimana pengaruh belanja urusan kesehatan dan pendidikan terhadap pembangunan manusia. Hubungan antara variabel belanja kesehatan dan pendidikan dengan pembangunan manusia didasarkan pada teori akuntabilitas publik, regulasi nasional, serta hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran yang di sajikan pada gambar berikut:



Keterangan:

- > Secara Parsial
 - - - - -> Secara Simultan

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Belanja urusan kesehatan secara parsial dapat berpengaruh terhadap pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023

2. Belanja urusan pendidikan secara parsial dapat berpengaruh terhadap pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023
3. Belanja urusan kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama atau simultan dapat berpengaruh terhadap pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023.